

# Perancangan Model Tata Kelola Kolaboratif dalam Peningkatan Kualitas SDM Perdesaan di Kabupaten Pandeglang

*by Atih Ardiansyah*

---

**Submission date:** 13-Nov-2021 01:12AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1700966517

**File name:** Model\_Tata\_Kelola\_Kolaboratif\_di\_Pandeglang\_\_\_KJAP\_Makassar.docx (1.18M)

**Word count:** 4031

**Character count:** 27727

# Perancangan Model Tata Kelola Kolaboratif Dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Perdesaan di Kabupaten Pandeglang

Eko Prasetyo<sup>1\*</sup>, Pri Utami<sup>2</sup>, Tifanni Aulia Amanda<sup>3</sup>

<sup>1</sup> <sup>13</sup>di Ilmu Administras Negara, Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia

<sup>2</sup> <sup>13</sup>di Ilmu Administras Negara, Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia

<sup>3</sup> Prodi Ilmu Administras Negara, Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia

## Abstract

*The poor quality of human capital in rural areas jeopardizes development's long-term viability. In response to these issues, the concept of collaborative governance allows various parties, including the government, private sector, academics, and the community, to participate in decision-making and the management of various public policies. This study aims to design a collaborative governance model in improving the quality of rural human resources. This study employs qualitative research methods, such as observations, literature and document studies, interviews, and focus group discussions with members of the Pandeglang Regency Government and Non-Governmental Organization. According to the study's findings, the implementation of collaborative governance in the rural human capital quality improvement program is still in the principle engagement stage. This is understandable given that collaboration is in the process of being strengthened. The collaborative governance model for the rural human capital quality improvement program in Pandeglang Regency has been developed using a state-centered model approach, in which the government is expected to appear to lead the collaboration.*

**Keywords:** collaborative governance, quality of rural human resource, rural development

## Abstrak

Kualitas SDM desa yang rendah memberikan dampak buruk terhadap keberlanjutan pembangunan. Menyikapi masalah tersebut, konsep tata kelola kolaboratif memberikan peluang kepada berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan berbagai kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk merancang model tata kelola kolaboratif dalam peningkatan kualitas SDM perdesaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan melakukan observasi, studi literatur dan dokumen, wawancara, serta focus group discussion dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang termasuk unsur DPRD dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan implementasi tata kelola kolaboratif baru pada dimensi keterlibatan berprinsip (*principle engagement*). Hal ini dapat dimaklumi, karena kolaborasi sedang dalam proses penguatan. Rancangan model tata kelola kolaboratif untuk program peningkatan kualitas SDM perdesaan Kabupaten Pandeglang disusun dengan menggunakan pendekatan *state-centered* model dimana pemerintah diharapkan tampil memimpin proses implementasi kolaborasi.

**Kata kunci:** tata kelola kolaboratif; kualitas sumber daya manusia perdesaan; pembangunan desa

---

\*prasetyo@unis.ac.id

## PENDAHULUAN

Momentum bonus demografi yang terjadi di Indonesia pada kurun 2020-2030 menyisakan sejumlah tantangan pembangunan di antaranya meningkatnya angka pengangguran terdidik serta kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjadi modal utama pembangunan ekonomi. Berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, salah satunya disebabkan oleh rendahnya daya tampung perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi secara nasional, yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di perguruan tinggi/ sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk usia 19-24 tahun, pada tahun 2020 menunjukkan angka sebesar 30,85 persen. Namun angka tersebut jika disandingkan antara APK perkotaan yang sebesar 38,58 persen dan APK perdesaan yang hanya 19,77 persen menunjukkan adanya disparitas, dimana peluang anak-anak perdesaan jauh lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak perkotaan (RI 2021).

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM melalui kebijakan pendidikan telah dilakukan.

Bahkan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD untuk anggaran pendidikan, sebagai pelaksanaan amanat pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Alokasi tersebut tertuang dalam APBN setiap tahun yang jumlahnya pada tahun 2021 mencapai 550 triliun meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 547,8 triliun (Kementerian Keuangan RI 2021). Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD tersebut dalam praktiknya masih belum dipatuhi oleh seluruh pemerintah di tingkat daerah. Menurut Bank Dunia, sebagian besar kabupaten/kota telah membelanjakan lebih dari 20 persen anggaran mereka untuk pendidikan, sedangkan untuk tingkat provinsi hanya sebesar 38 persen saja yang telah memenuhi mandat konstitusi (The World Bank, 2020).

Kebijakan peningkatan akses pendidikan tinggi telah dilakukan oleh pemerintah di antaranya melalui program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). KIP Kuliah merupakan bagian dari Program Indonesia Pintar (PIP) yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang diterima di perguruan

tinggi termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas mahasiswa pemegang KIP, mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus, mahasiswa afirmasi<sup>22</sup> serta mahasiswa terkena bencana atau kondisi khusus (Kemendikbud, 2021). Target penerima KIP Kuliah pada tahun 2021<sup>7</sup> adalah sebanyak 200.000 orang mahasiswa penerima KIP Kuliah baru, selain terus menjamin penyaluran KIP Kuliah *on going* dan Bidikmisi *on going* sampai masa studi selesai (Kemendikbud, 2021).

Data dan informasi di atas menimbulkan pertanyaan besar bagi kita, jika akses pendidikan tinggi secara nasional sangat kecil, maka bagaimana kemungkinan SDM di perdesaan akan mampu bersaing<sup>25</sup> memperoleh kesempatan tersebut? Data angkatan kerja usia 15 tahun ke atas menurut jenjang pendidikan di Indonesia menunjukkan situasi yang semakin buram bagi SDM perdesaan. Pada tahun 2020, jumlah angkatan kerja di perdesaan yang mengenyam pendidikan tinggi hanya 8%, sangat jauh jika dibandingkan dengan perkotaan sebesar 17%. Menurut BPS, sebanyak 69% dari angkatan kerja di perdesaan hanya berpendidikan sampai dengan sekolah

menengah tingkat pertama (SMP) (RI 2021).

Atas dasar uraian tersebut, dapat digarisbawahi bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD belum secara optimal mampu memperluas akses SDM desa menikmati pendidikan tinggi, dimana akses tersebut masih sangat kecil sesuai data APK Pendidikan Tinggi di perdesaan yaitu 16,54 persen dan hanya 8 persen angkatan kerja perdesaan yang berpendidikan tinggi. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana memberikan intervensi untuk memperluas akses tersebut? Penelitian ini mencoba untuk melakukan perancangan model dan membuka peluang-peluang yang masih bisa dioptimalkan oleh pemerintah daerah maupun desa dalam meningkatkan kualitas SDM di perdesaan.

Salah satu teori penting yang perlu dicermati terkait dengan permasalahan di atas adalah teori tentang tata kelola kolaboratif<sup>36</sup> (*collaborative governance*). Tata kelola kolaboratif merupakan sebuah pemerintahan dimana<sup>3</sup> satu atau lebih lembaga publik secara langsung mengikutsertakan pemangku kepentingan dari luar pemerintahan (*non-state*) dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal,

berorientasi konsensus, dilaksanakan melalui musyawarah, dan bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik ataupun mengelola program pemerintah atau aset negara bersama-sama (Ansell and Gash 2008).

Konsep tersebut menekankan pada enam kriteria penting dari suatu tata kelola kolaboratif yaitu: (1) forum tersebut dirintis oleh lembaga pemerintah, (2) peserta di dalam forum melibatkan aktor-aktor non pemerintah, (3) peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan tidak sekedar sebagai mitra konsultasi semata, (4) forum tersebut dikelola secara formal dan melakukan pertemuan secara kolektif, (5) forum bertujuan untuk membuat keputusan secara konsensus, (6) fokus dari kolaborasi adalah pada kebijakan publik atau pengelolaan program pemerintah (*publik management*) (Ansell and Gash 2008).

Tata kelola kolaboratif juga dikenal dengan istilah tata kelola partisipatif (*participatory governance*) yang dimaknai dengan serangkaian proses dan struktur dari pengambilan keputusan pemerintah yang melibatkan aktor-aktor dari sektor swasta, masyarakat sipil, dan atau sektor publik lainnya, dengan berbagai tingkat komunikasi, kolaborasi, dan

pendelegasian kewenangan keputusan kepada peserta (Newig et al. 2018) (Kübler et al. 2020) (Gustafson and Hertting 2017).

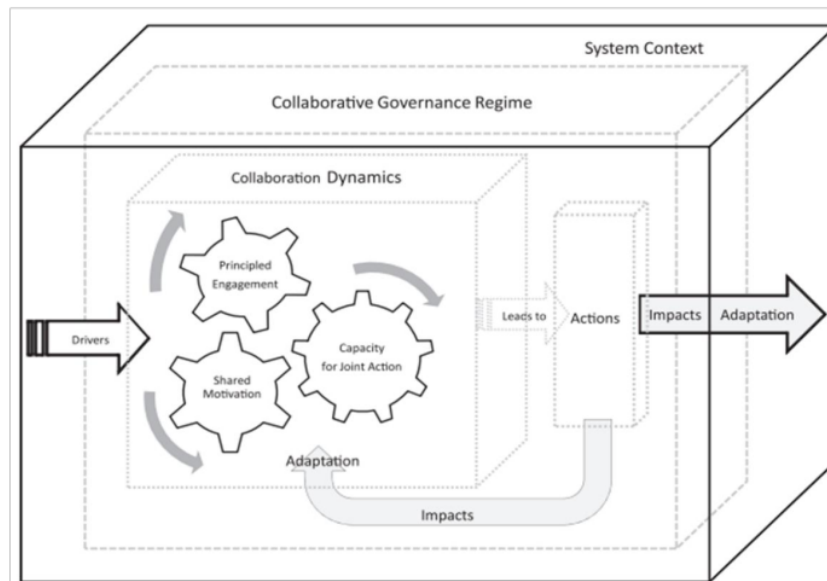
Kirk Emerson dkk menjelaskan bahwa tata kelola kolaboratif merupakan serangkaian proses dan struktur dari pengambilan keputusan dan pengelolaan kebijakan publik yang melibatkan pihak-pihak secara konstruktif dengan melintasi batasan lembaga-lembaga pemerintah, tingkatan pemerintahan dan ataupun pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan publik yang tidak bisa dituntaskan (Emerson, Nabatchi, and Balogh 2012).

Selanjutnya Emerson dkk memperkenalkan kerangka kerja integratif untuk tata kelola kolaboratif sebagaimana tertera pada Gambar 1.

Kerangka kerja integratif tersebut menggambarkan adanya tiga dimensi dalam tata kelola kolaboratif yaitu konteks sistem (*system context*), rezim tata kelola kolaboratif, dan dinamika kolaborasi yang mengarahkan pada terjadinya berbagai aksi (Emerson, Nabatchi, and Balogh 2012).

Di dalam tata kelola kolaboratif, konteks sistem merupakan sistem yang melingkupi kolaborasi, yang dapat

Gambar 1  
Kerangka Kerja Integratif Tata Kelola Kolaboratif



Sumber: Emerson, Nabatchi, and Balogh, 2012, halaman 5

terdiri dari sistem politik, hukum, sosial ekonomi, lingkungan dan berbagai faktor lainnya yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh rezim tata kelola kolaboratif. Konteks sistem ini menimbulkan berbagai peluang dan kendala yang mempengaruhi dinamika kolaborasi di awal dan di sepanjang waktu. Dari konteks sistem ini muncul berbagai faktor penggerak, termasuk kepemimpinan, insentif, saling ketergantungan, dan ketidakpastian. Hal tersebut akan membantu pengaturan arah dan mulainya rezim tata kelola kolaboratif.

Atas dasar uraian tersebut, dapat digarisbawahi bahwa alokasi anggaran

pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD belum secara optimal mampu memperluas akses SDM desa menikmati pendidikan tinggi, dimana akses tersebut masih sangat kecil sesuai data APK Pendidikan Tinggi di perdesaan yaitu 16,54 persen dan hanya 8 persen angkatan kerja perdesaan yang berpendidikan tinggi. Menurut data Statistik Makro Sosial Budaya Kabupaten Pandeglang Tahun 2019, pada tahun 2018 hanya 4,42 persen penduduk yang menamatkan pendidikan hingga universitas/ perguruan tinggi. Sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Pandeglang tahun 2018 adalah 6,72 tahun (Dinas Kominfo, 2019). Data tersebut

mengindikasikan mengenai perlunya kebijakan terobosan dan lompatan kinerja di Kabupaten Pandeglang untuk meningkatkan kualitas SDM dari kondisi sekarang. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa upaya meningkatkan kualitas SDM perdesaan tidak akan mungkin diselesaikan sendiri oleh pemerintah, maka model tata kelola kolaboratif yang melibatkan aktor-aktor non pemerintah kiranya menjadi perhatian dalam pembangunan perdesaan.

Penelitian ini mencoba untuk melakukan perancangan model dan membuka peluang-peluang yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah maupun desa dalam meningkatkan kualitas SDM perdesaan dengan model tata kelola kolaboratif. Permodelan tersebut dapat menjadi acuan dalam melakukan intervensi berupa kebijakan dan program untuk meningkatkan kualitas SDM perdesaan, sehingga pembangunan di perdesaan menjadi berkelanjutan karena memiliki SDM dengan kualitas berpendidikan tinggi.

34

## METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, berdasarkan pada kajian literatur dan dokumen, pengamatan di lapangan dan

berbagai laman digital yang terkait, wawancara, *focus group discussion* serta kompilasi dari <sup>38</sup> hasil-hasil penelitian dan kajian yang telah dilakukan sebelumnya.

Penelitian terutama dilakukan di Kabupaten Pandeglang, Banten, yang ditemukan fenomena menarik yaitu pemberian beasiswa untuk pendidikan tinggi dari tokoh masyarakat yang bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat Yayasan Cendekiawan Kampung Indonesia. Terhadap fenomena tersebut, Pemerintah Kabupaten Pandeglang memberikan apresiasi dan siap merancang suatu kebijakan untuk mengakomodir keterlibatan masyarakat, LSM, termasuk sektor swasta, untuk bersama-sama pemerintah memperluas akses pendidikan tinggi bagi SDM desa.

Informan dalam penelitian ini para aktor kolaborasi yaitu Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, Ketua Yayasan Cendekiawan Kampung Indonesia, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang, serta para penerima beasiswa.

Sumber data berasal dari hasil wawancara dengan informan dan hasil *focus group discussion*. Selain itu data dan informasi diperoleh dari saluran media sosial resmi Yayasan

Cendekiawan Kampung Indonesia, beberapa sesi webinar yang sempat diikuti oleh peneliti dan berbagai pemberitaan berkaitan dengan para aktor kolaborasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perkembangan Proses Kolaborasi

Permasalahan publik yang mendasar di perdesaan Kabupaten Pandeglang adalah kurang tersedianya SDM terampil dan berpendidikan. Menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, dampak urbanisasi yang menyedot SDM berkualitas di perdesaan untuk berkiprah di kota, karena perdesaan sudah tidak menarik bagi mereka. Faktor lain adalah tidak meratanya lembaga pendidikan yang berperan dalam meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya, faktor disparitas pendidikan di perdesaan yang disebabkan oleh faktor geografis wilayah menjadi penyebab penting. Daerah-daerah yang sulit dijangkau karena kendala geografis, relatif tidak memiliki SDM yang berkualitas (wilayah Pandeglang Tengah dan Selatan).

Berbagai penelitian yang ada, menunjukkan bahwa urbanisasi menjadi faktor penting yang menyedot sumber daya manusia berkualitas di desa menuju perkotaan (Kustanto and Sholihah 2020) (Fazaalloh 2017) (Suryani 2020). Penyebab lain rendahnya kualitas SDM desa adalah masalah disparitas pendidikan berupa ketimpangan pemerataan pendidikan dan infrastruktur di perdesaan (Iryani and Ramdani 2019).

Permasalahan publik tersebut tidak dapat diselesaikan secara tuntas dengan pendekatan pembangunan pendidikan yang ada. Pembangunan pendidikan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Pandeglang masih difokuskan pada penyediaan infrastruktur pendidikan terutama untuk wilayah yang secara geografis sulit dijangkau. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan alokasi anggaran pendidikan pada APBD Kabupaten Pandeglang walaupun telah mencapai 24% dari total APBD.

Yayasan Cendekiawan Kampung Indonesia di Kabupaten Pandeglang tergerak oleh permasalahan di atas, sehingga pembentukan Yayasan dilakukan dengan mengusung visi “Menjadi model pembangunan kawasan berbasis sumber daya manusia dengan mengusung konsep beasiswa *talent scouting* bagi genius kampung.” Atih

Ardiansyah, Ketua Yayasan Cendekiawan Kampung Indonesia, menjelaskan bahwa awalnya Yayasan dibentuk untuk menyelamatkan anak-anak kampung agar tidak putus studi. Dalam perkembangannya Yayasan berupaya memfasilitasi talenta terbaik di perdesaan untuk dapat melanjutkan studi baik tingkat SLTA maupun perguruan tinggi, dan setelah menyelesaikan studi, para peserta difasilitasi dengan program pengabdian di masing-masing desa agar tercipta proses perubahan di desa-desa ke arah yang lebih baik. Sejak 2019 hingga saat ini, jumlah peserta program Yayasan mencapai 36 orang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1  
Penerima Beasiswa Yayasan  
Cendekiawan Kampung Indonesia  
Per Oktober 2021

| No    | Daerah Asal | Jenjang |         |          |        |
|-------|-------------|---------|---------|----------|--------|
|       |             | SLTA    | Sarjana | Magister | Jumlah |
| 1     | Banten      | -       | 29      | 2        | 31     |
| 2     | Maluku      | 1       | 3       | -        | 4      |
| 3     | Papua Barat | -       | 1       | -        | 1      |
| Total |             | 1       | 33      | 2        | 36     |

Sumber: Yayasan Cendekiawan Kampung Indonesia

Program Yayasan yang baru terbentuk pada tahun 2019 tersebut, ternyata mendapat sambutan bukan

hanya dari wilayah Kabupaten Pandeglang, namun juga dari Kabupaten Serang, bahkan dari Maluku Utara dan Papua Barat. Selain daerah-daerah tersebut, permintaan kolaborasi juga berasal dari Kabupaten Lebak, Banten dan Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Kiprah Yayasan mendapat respon positif dari pemerintah Kabupaten Pandeglang, dalam hal ini Bupati Pandeglang Irna Narulita, dalam berbagai kesempatan sangat mendukung program-program Yayasan Cendekiawan Kampung Indonesia. Dukungan tersebut telah diwujudkan <sup>26</sup> dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) antara Bupati dengan Ketua Yayasan. Selanjutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang telah menindaklanjuti dengan memasukkan program Pro Kampus (Program Kurangi Anak dan Mahasiswa Putus Studi) ke dalam <sup>24</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 Kabupaten Pandeglang.

Mendukung respon positif Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang Tb. Udi Juhdi, menyatakan bahwa akan mendorong terwujudnya kebijakan berupa peraturan daerah ataupun peraturan bupati yang berisi pengelolaan

| Tabel 2                   |                                                      |                |                                                                |                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Aktor Kolaborasi          |                                                      |                |                                                                |                      |
| No.                       | Aktor                                                | Jenis Lembaga  | Sumber Daya                                                    | Peran                |
| 1                         | Yayasan Cendekiawan Kampung Indonesia                | Non-pemerintah | - SDM<br>- Manajemen<br>- Keuangan                             | Penggerak kolaborasi |
| 2                         | Bupati Pandeglang                                    | Pemerintah     | - Kebijakan<br>- Program beasiswa<br>- Kewenangan              | Kolaborator          |
| 3                         | Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang                      | Pemerintah     | - Kebijakan<br>- Kewenangan<br>- Politik                       | Kolaborator          |
| 4                         | Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang                | Pemerintah     | - Kebijakan<br>- Kewenangan<br>- Politik<br>- Program beasiswa | Kolaborator          |
| 5                         | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang | Pemerintah     | - Kebijakan<br>- Program beasiswa<br>- Kewenangan              | Kolaborator          |
| 6                         | Madrasah Aliyah dan STMIK Yayasan Al Fath Sukabumi   | Akademisi      | - Beasiswa                                                     | Kolaborator          |
| 7                         | STIE Ganesha Tangerang Selatan                       | Akademisi      | - Beasiswa                                                     | Kolaborator          |
| 8                         | Yayasan Amanah Takaful                               | Non-pemerintah | - Wakaf Al Quran<br>- Asuransi                                 | Kolaborator          |
| Sumber: Hasil FGD, diolah |                                                      |                |                                                                |                      |

talenta terbaik Kabupaten Pandeglang untuk peningkatan kualitas SDM perdesaan dan keberlanjutan pembangunan. Bahkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang, Tb. Asep Rafiudin Arif, mempertegas kolaborasi tersebut melalui peluncuran Beasiswa SABAR (Sahabat Baik Asep Rafi), yang dikelola bersama dengan Yayasan Cendekiawan Kampung Indonesia. Adapun aktor-aktor yang terlibat dan peranannya di dalam kolaborasi adalah sebagaimana tertera pada Tabel 2.

Kemajuan kolaborasi program peningkatan kualitas SDM perdesaan melalui program beasiswa yang digagas Yayasan Cendekiawan Kampung

Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang memang belum menghasilkan format kolaborasi yang permanen. Hingga saat ini belum ada hal signifikan yang telah dilakukan untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MoU). Yayasan Cendekiawan Kampung Indonesia berharap agar kolaborasi ini lebih diarahkan pada sebuah program yang berkelanjutan dan dinaungi kebijakan kolaboratif melalui suatu wadah forum yang ditetapkan oleh Bupati. Sambil terus mendorong terwujudnya kebijakan kolaboratif tersebut, Yayasan Cendekiawan Kampung Indonesia kemudian membentuk Lembaga Wakaf

Cendekiawan Kampung yang dapat difungsikan sebagai wadah kolaborasi berbagai pihak. Tentunya jika kolaborasi dimotori oleh masyarakat, dalam hal ini Yayasan Cendekiawan Kampung Indonesia, dengan wadah lembaga wakaf tersebut, maka terjadi pergeseran model dari yang semula terpusat pada pemerintah (*state-centered model*) menjadi terpusat pada masyarakat (*society-centered model*). Selain itu pembentukan lembaga wakaf didasarkan pada pemahaman bahwa persoalan pendidikan adalah persoalan yang abadi (selalu mengemuka di sepanjang masa), sehingga perlu didekati dengan wakaf yang konsepnya serupa dengan dana abadi.

### **Implementasi Tata Kelola Kolaboratif**

Dengan menggunakan model diagnostik yang diperkenalkan oleh Emerson dkk, maka implementasi tata kelola kolaboratif dapat dianalisis dari dimensi konteks sistem (*system context*), penggerak (*drivers*), rezim kolaboratif (*collaborative governance regime*), serta *outcome* dari kolaborasi. Gambaran model diagnostik tersebut adalah sebagaimana tersebut pada Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3 tersebut, maka implementasi tata kelola kolaboratif pada program peningkatan kualitas SDM perdesaan belum terwujud

pada semua dimensi yang disyaratkan oleh Model Integratif Tata Kelola Kolaboratif Emerson dkk.

Dimensi konteks sistem (*system contexts*) meliputi faktor-faktor berikut ini (1) pendidikan yaitu keterbatasan anggaran pendidikan yang lebih terfokus pada pembangunan fisik, rendahnya kualitas SDM perdesaan, dan kegagalan sistem pendidikan menyediakan SDM terampil sesuai kebutuhan pembangunan desa; (2) ekonomi yaitu kurangnya kemampuan ekonomi masyarakat desa yang ditunjukkan oleh rendahnya pendapatan per kapita masyarakat; (3) budaya yaitu masih kentalnya budaya anak-anak adalah “aset” bagi orang tua, sehingga mereka berharap agar anak-anak sesegera mungkin bekerja dan berpenghasilan; (4) politik daerah yaitu konstelasi politik di tingkat kabupaten dan desa yang meminggirkan pembangunan SDM. Selain itu masa jabatan bupati pada periode kedua ini yang terbatas hanya 3 tahun sampai dengan 2024 memberikan pengaruh pada keterbatasan dalam pencapaian visi dan misinya; (5) politik anggaran yaitu politik pengalokasian anggaran yang cenderung terpusat dan seragam hingga tingkat kabupaten dan desa. Termasuk dalam hal ini adalah perhatian yang besar terhadap anggaran pembangunan infrastruktur terutama jalan kabupaten

dibandingkan dengan alokasi untuk pendidikan yang sangat rendah; (6) sumber daya lokal yaitu <sup>15</sup> potensi sumber daya alam yang luar biasa di Pandeglang belum memberikan pengaruh yang signifikan kepada kesejahteraan rakyatnya, hal ini menimbulkan arus urbanisasi dan menghilangnya SDM terbaik dari desa-desa di Pandeglang. Termasuk dalam aspek ini adalah rencana pembangunan industri di kawasan sepanjang jalan tol Serang-Panimbang tentu berdampak pada sumber daya alam dan lingkungan hidup di Pandeglang.

Penggerak (*drivers*) kolaborasi dalam hal ini meliputi: (1) kepemimpinan, hal lebih banyak diambil oleh sektor ketiga (masyarakat) yaitu Yayasan Cendekiawan Kampung Indonesia yang mengambil inisiatif dan terus berjuang agar terwujud program kolaboratif. Pemerintah daerah walaupun mendukung, masih belum mengambil peran untuk memimpin kolaborasi serta belum banyak mengambil inisiatif. Model tata kelola kolaboratif yang menempatkan masyarakat sebagai penggerak utama dapat ditemukan dalam penelitian Susan E. Clarke yang menyebutnya dengan *society-centered models* (Clarke 2017); (2) insentif konsekuensial, dimensi ini ditandai dari kesadaran bahwa

penyelesaian masalah kualitas SDM di perdesaan akan menjadi insentif bagi keberlanjutan pembangunan; (3) kesalingtergantungan antar aktor ditandai adanya kebutuhan untuk berkembang bersama, bekerja bersama, dimana tidak mungkin masalah peningkatan kualitas SDM tersebut dapat diselesaikan sendiri oleh masing-masing aktor. Muncul kesadaran bahwa APBD sangat terbatas dengan pendapatan asli daerah yang kecil (menurut DPRD Pandeglang, tahun 2021 sebesar Rp240 miliar). Adapun dimensi ketidakpastian terlihat dari adanya ketidakpastian mengenai kemampuan menyelesaikan masalah publik berupa peningkatan kualitas SDM perdesaan tersebut.

Memasuki proses terbentuknya tata kelola kolaboratif adalah adanya rezim tata kelola kolaboratif. Dalam hal ini terdapat tiga dimensi <sup>10</sup> yaitu keterlibatan berprinsip (*principle engagement*), motivasi bersama (*shared motivation*), dan kapasitas untuk melakukan aksi bersama (*capacity for joint action*).



Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa hanya dimensi keterlibatan berprinsip yang telah menunjukkan adanya kemajuan. Dalam dimensi ini pihak-pihak yang melakukan kolaborasi telah mulai berproses dengan terjadinya beberapa indikator yaitu: (1) *discovery* (penemuan masalah) melalui beberapa pertemuan formal dan informal antar aktor, serta webinar pada beberapa sesi yang membahas topik peningkatan kualitas SDM perdesaan. Berbagai aktor yang terlibat telah memiliki kesamaan pemahaman mengenai masalah publik yang akan diselesaikan yaitu rendahnya kualitas SDM perdesaan; (2) *definition* (pendefinisian) atas masalah yang dihadapi yang bertujuan untuk menemukan makna bersama dari masalah. Hal ini dilakukan dengan beberapa pertemuan formal dan informal, namun demikian belum terdapat kesepakatan mengenai konsep, peluang, kriteria dan alternatif solusi; (3) *deliberation* <sup>40</sup> (musyawarah) telah dilaksanakan yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang dengan melibatkan para aktor serta pihak-pihak lain yang memiliki peluang terlibat, namun demikian, kegiatan tersebut masih terbatas dan belum dilakukan dengan mengundang keterlibatan publik; (4) *determination*

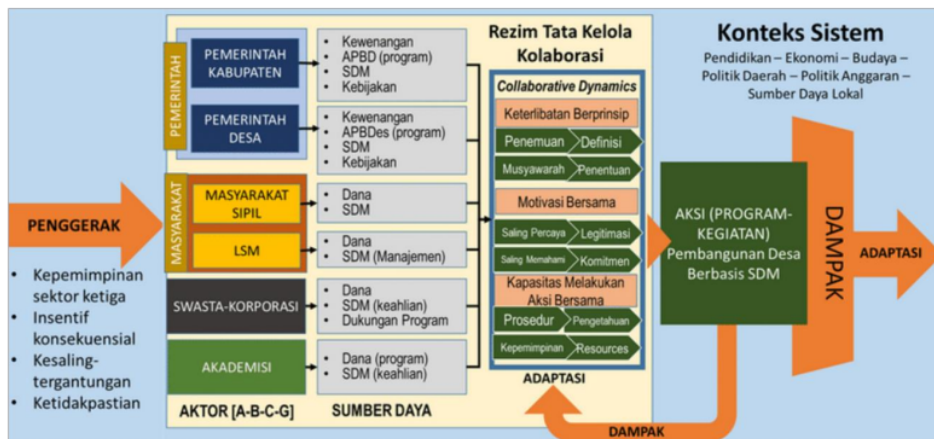
(penentuan) belum terlihat adanya keputusan-keputusan, karena kolaborasi masih berproses dan belum adanya kesepakatan atas agenda, kegiatan, maupun rencana aksi. Hal tersebut juga disebabkan belum adanya alokasi anggaran yang memadai untuk memulai program Pro Kampus yang telah tertuang di dalam RPJMD.

Dapat dikemukakan bahwa tahapan implementasi tata kelola kolaboratif untuk program peningkatan kualitas SDM perdesaan di Kabupaten Pandeglang masih berproses dan baru dimulai pada dimensi keterlibatan berprinsip. Adapun dimensi lain yaitu <sup>1</sup> *motivasi bersama (shared motivation)*, *kapasitas untuk aksi bersama (capacity for joint action)* belum terimplementasi. Dengan demikian, dimensi luaran (*output*) dan pengaruh (*outcome*) serta proses adaptasi belum terwujud.

### **Rancangan Model Peningkatan Kualitas SDM Perdesaan Melalui Tata Kelola Kolaboratif**

Tata kelola kolaboratif untuk peningkatan kualitas SDM perdesaan di Kabupaten Pandeglang sedang dalam proses implementasi. Momentum ini menjadi penting untuk menyodorkan konsep mengenai rancangan model tata kelola kolaboratif yang dapat diadopsi

Gambar 2  
Rancangan Model Tata Kelola Kolaboratif  
Pembangunan Desa Berbasis Peningkatan Kualitas SDM



Sumber: Hasil FGD, diolah peneliti

Pemerintah Kabupaten dalam mengimplementasikannya.

Mengacu kepada model integratif tata kelola kolaboratif yang diajukan oleh Emerson, maka rancangan model yang dapat diadaptasi adalah sebagaimana tertera pada Gambar 2.

Dari gambar 2 tersebut dapat dijelaskan bahwa aktor-aktor yang terlibat meliputi ABCG yaitu akademisi (perguruan tinggi), *business* (swasta), *community* (masyarakat), dan *government* (pemerintah). Khusus pemerintah daerah, pihak-pihak yang memiliki potensi terlibat dalam kolaborasi adalah Bupati (diharapkan dapat memimpin kolaborasi), DPRD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, serta Bappeda.

Rancangan model tata kelola kolaboratif untuk program peningkatan kualitas SDM perdesaan di Kabupaten Pandeglang diarahkan pada model yang bersifat *state-centered model*, dengan harapan peran pemerintah daerah akan lebih dominan di dalamnya. Hal ini dilatarbelakangi antara lain oleh adanya: (1) visi dan misi Bupati terpilih untuk menekan jumlah anak putus sekolah baik di tingkat pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi yang dikenal dengan Program Kurangi Anak dan Mahasiswa Putus Studi (Pro Kampus) dan sudah dituangkan dalam RPJMD; (2) agar terdapat kesinambungan program karena model ini memungkinkan untuk melakukan intervensi terhadap kebijakan yang kolaboratif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi tata kelola kolaboratif dalam program peningkatan kualitas SDM perdesaan baru pada tahapan keterlibatan berprinsip (*principle engagement*). Dan tahapan tersebut saat ini masih berproses menuju tahapan selanjutnya. Pada tahapan ini walaupun kepemimpinan dan inisiatif lebih diperankan oleh Yayasan Cendekiawan Kampung Indonesia selaku aktor dari pihak masyarakat, namun Pemerintah Daerah menunjukkan komitmen yang positif melalui penandatanganan MoU dan pencantuman dalam RPJMD. Sebagai bagian dari unsur pemerintah, DPRD memiliki komitmen kuat untuk mendorong terwujudnya kebijakan kolaboratif baik dalam bentuk peraturan daerah ataupun peraturan bupati.

Keunikan model kolaboratif pada program ini adalah lahirnya program-program yang merupakan kerja sama antara tokoh masyarakat, dalam hal ini politisi dan anggota DPRD, dengan Yayasan Cendekiawan Kampung Indonesia. Program tersebut kemudian dilakukan *branding* khusus yang disesuaikan dengan tujuannya.

Rekomendasi yang dapat penulis sampaikan dalam perancangan model peningkatan kualitas SDM perdesaan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Pendeglang perlu memperkuat orientasi pembangunan desa ke arah pembangunan berbasis SDM yang berkualitas dengan memanfaatkan sumber daya yang ada seperti optimasi dana APBD, dana desa maupun dana wakaf. Hal ini agar tercipta keberlanjutan pembangunan serta pemanfaatan <sup>41</sup> potensi sumber daya alam yang memberikan nilai tambah yang lebih banyak bagi masyarakat lokal;
2. Model tata kelola kolaboratif yang berpusat pada pemerintah (*state-centered model*) memberikan konsekuensi agar pemerintah daerah mengambil peran untuk memimpin kolaborasi;
3. Implementasi tata kelola kolaboratif agar dilaksanakan dengan konsisten sehingga mampu <sup>43</sup> mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi dan akuntabilitas program, serta terjadinya penguatan kedudukan masyarakat sipil;
4. Peran pemerintah selaku aktor yang memiliki mandat dan kewenangan untuk menyelesaikan masalah publik

perlu dioptimalkan melalui terwujudnya kebijakan kolaboratif. Penting untuk menterjemahkan program dari RPJMD menjadi kegiatan yang kolaboratif dengan payung hukum yang memadai;

5. Pemerintah Kabupaten Pandeglang perlu memiliki kreativitas dan level komitmen yang tinggi untuk mewujudkan visi dan misi Bupati, khususnya program Pro Kampus. Hal ini mengingat masa jabatan periode kedua Bupati yang lebih pendek, yaitu hanya sampai 2024.
6. Masyarakat perlu memanfaatkan peluang kolaborasi bukan hanya untuk mengusulkan program-program yang dibutuhkan, tetapi juga terlibat dalam mengelola, mengawasi dan mengevaluasi program.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang, atas dukungan pendanaan yang telah diberikan.

Selain itu, ucapan terima kasih perlu kami sampaikan kepada Yayasan Cendekiawan Kampung Indonesia yang telah memberikan persetujuan untuk menjadi lokus penelitian. Terima kasih

juga kami sampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Kabupaten Pandeglang yaitu Bupati Pandeglang beserta jajarannya, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang yang telah memberikan data, informasi dan masukan selama pelaksanaan penelitian ini.

#### REFERENSI

1. Ansell, Chris, and Alison Gash. 2008. "Collaborative Governance in Theory and Practice." *Journal of Public Administration Research and Theory* 18(4).
49. Clarke, Susan E. 2017. "Local Place-Based Collaborative Governance: Comparing State-Centric and Society-Centered Models." *Urban Affairs Review* 53(3).
15. Emerson, Kirk, Tina Nabatchi, and Stephen Balogh. 2012. "An Integrative Framework for Collaborative Governance." *Journal of Public Administration Research and Theory* 22(1).
48. Fazaalloh, Al Muizzuddin. 2017. "Urbanisasi, Industrialisasi, Pendapatan, Dan Pendidikan Di Indonesia." *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi* 1(1).

Gustafson, Per, and Nils Hertting. 2017.

“Understanding Participatory Governance: An Analysis of Participants’ Motives for Participation.” *American Review of Public Administration* 47(5).

Iryani, Endang, and Ahmad Subkhi Ramdani. 2019. “Kajian Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Analisa Pengaruh Rendahnya Indeks Pendidikan Di Kabupaten Tangerang.” *Jurnal Inovasi Pendidikan MH Thamrin* 3(2).

Kementerian Keuangan RI. 2021. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran *Informasi APBN 2021*.

Kübler, Daniel, Philippe E. Rochat, Su

Yun Woo, and Nico van der Heiden. 2020. “Strengthen Governability Rather than Deepen Democracy: Why Local Governments Introduce Participatory Governance.” *International Review of Administrative Sciences* 86(3).

Kustanto, Munari, and Fitriyatus Sholihah. 2020. “Reserve Brain Drain Sebagai Alternatif Mengatasi Kemiskinan.” *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK* 16(1).

Newig, Jens et al. 2018. “The Environmental Performance of

Participatory and Collaborative Governance: A Framework of Causal Mechanisms.” *Policy Studies Journal* 46(2).

RI, BPS. 2021. 1101001 Badan Pusat Statistik *Statistik Indonesia 2021*.

Suryani, Rindang. 2020. “Dampak Urbanisasi Terhadap Krisis Regenerasi Petani Di Pedesaan.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.

The World Bank. 2020. “Kajian Belanja Publik Indonesia: Belanja untuk Hasil yang Lebih Baik.”

# Perancangan Model Tata Kelola Kolaboratif dalam Peningkatan Kualitas SDM Perdesaan di Kabupaten Pandeglang

## ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[aimos.ugm.ac.id](https://aimos.ugm.ac.id)

Internet Source

1%

2

Submitted to Universitas Negeri Jakarta

Student Paper

1%

3

[inspirasi.bpsdm.jabarprov.go.id](https://inspirasi.bpsdm.jabarprov.go.id)

Internet Source

1%

4

Submitted to Program Pascasarjana  
Universitas Negeri Yogyakarta

Student Paper

1%

5

[www.rizqimaharantau.com](https://www.rizqimaharantau.com)

Internet Source

1%

6

[www.readbag.com](https://www.readbag.com)

Internet Source

1%

7

[www.warmadewa.ac.id](https://www.warmadewa.ac.id)

Internet Source

1%

8

[123dok.com](https://123dok.com)

Internet Source

<1%

|    |                                                                                                                         |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 9  | <a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a><br>Internet Source                                                     | <1 % |
| 10 | <a href="http://ejournal.urindo.ac.id">ejournal.urindo.ac.id</a><br>Internet Source                                     | <1 % |
| 11 | <a href="http://openknowledge.worldbank.org">openknowledge.worldbank.org</a><br>Internet Source                         | <1 % |
| 12 | <a href="http://webapps.bps.go.id">webapps.bps.go.id</a><br>Internet Source                                             | <1 % |
| 13 | <a href="http://ejournal.unis.ac.id">ejournal.unis.ac.id</a><br>Internet Source                                         | <1 % |
| 14 | <a href="http://hilirisasi.lppm.unand.ac.id">hilirisasi.lppm.unand.ac.id</a><br>Internet Source                         | <1 % |
| 15 | <a href="http://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a><br>Internet Source                                             | <1 % |
| 16 | <a href="http://vdocuments.site">vdocuments.site</a><br>Internet Source                                                 | <1 % |
| 17 | <a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a><br>Internet Source                                                           | <1 % |
| 18 | <a href="http://journal.unnes.ac.id">journal.unnes.ac.id</a><br>Internet Source                                         | <1 % |
| 19 | Faisal Faisal, Nursariani Simatupang.<br>"Kebijakan Nonpenal dalam Rangka Upaya Preventif Anak sebagai Korban Kekerasan | <1 % |

# Fisik dan Psikis di Sekolah", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2021

Publication

|    |                                                                                                         |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 20 | <a href="http://docobook.com">docobook.com</a><br>Internet Source                                       | <1 % |
| 21 | <a href="http://fkip.unpas.ac.id">fkip.unpas.ac.id</a><br>Internet Source                               | <1 % |
| 22 | <a href="http://idsch.id">idsch.id</a><br>Internet Source                                               | <1 % |
| 23 | <a href="http://issuu.com">issuu.com</a><br>Internet Source                                             | <1 % |
| 24 | <a href="http://kaltim.tribunnews.com">kaltim.tribunnews.com</a><br>Internet Source                     | <1 % |
| 25 | <a href="http://pasir.desa.id">pasir.desa.id</a><br>Internet Source                                     | <1 % |
| 26 | <a href="http://ptppi.co.id">ptppi.co.id</a><br>Internet Source                                         | <1 % |
| 27 | <a href="http://e-journal.upr.ac.id">e-journal.upr.ac.id</a><br>Internet Source                         | <1 % |
| 28 | <a href="http://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id">ejurnal.kependudukan.lipi.go.id</a><br>Internet Source | <1 % |
| 29 | <a href="http://ejurnal.stikesdhib.ac.id">ejurnal.stikesdhib.ac.id</a><br>Internet Source               | <1 % |
| 30 | <a href="http://gustaphalbar.blogspot.com">gustaphalbar.blogspot.com</a><br>Internet Source             | <1 % |

|    |                                                                                                                                                                               |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 31 | <a href="http://koreascience.or.kr">koreascience.or.kr</a><br>Internet Source                                                                                                 | <1 % |
| 32 | <a href="http://kotaku.pu.go.id">kotaku.pu.go.id</a><br>Internet Source                                                                                                       | <1 % |
| 33 | <a href="http://repository.unmul.ac.id">repository.unmul.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                         | <1 % |
| 34 | <a href="http://www.repository.trisakti.ac.id">www.repository.trisakti.ac.id</a><br>Internet Source                                                                           | <1 % |
| 35 | Ardiyansah. "Strategi Peningkatan Predikat Daerah Tertinggal di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten", JDKP : Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik, 2020<br>Publication | <1 % |
| 36 | Submitted to Sogang University<br>Student Paper                                                                                                                               | <1 % |
| 37 | <a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                             | <1 % |
| 38 | <a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a><br>Internet Source                                                                                                         | <1 % |
| 39 | <a href="http://e-jurnal.lppmunsera.org">e-jurnal.lppmunsera.org</a><br>Internet Source                                                                                       | <1 % |
| 40 | <a href="http://ekorantt.com">ekorantt.com</a><br>Internet Source                                                                                                             | <1 % |
| 41 | <a href="http://forestpreneurpt.blogspot.com">forestpreneurpt.blogspot.com</a><br>Internet Source                                                                             | <1 % |

|    |                                                                                                                                                      |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 42 | <a href="http://imammujtaba.wordpress.com">imammujtaba.wordpress.com</a><br>Internet Source                                                          | <1 % |
| 43 | <a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a><br>Internet Source                                                                                | <1 % |
| 44 | K. Emerson. "An Integrative Framework for Collaborative Governance", Journal of Public Administration Research and Theory, 01/01/2012<br>Publication | <1 % |
| 45 | <a href="http://repositori.kemdikbud.go.id">repositori.kemdikbud.go.id</a><br>Internet Source                                                        | <1 % |
| 46 | <a href="http://academic.oup.com">academic.oup.com</a><br>Internet Source                                                                            | <1 % |
| 47 | <a href="http://www.ssoar.info">www.ssoar.info</a><br>Internet Source                                                                                | <1 % |
| 48 | <a href="http://blog.umi.ac.id">blog.umi.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                | <1 % |
| 49 | <a href="http://urbanaffairsreview.com">urbanaffairsreview.com</a><br>Internet Source                                                                | <1 % |

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On